



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020

Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 1483 /SEK/KU.00/10/2019

16 Oktober 2019

Lampiran : Satu Set

Hal : Permintaan Dokumen

- Yth. 1. Sekretaris Pengadilan Negeri Sidoarjo
2. Sekretaris Pengadilan Negeri Medan
3. Sekretaris Pengadilan Negeri Bale Bandung
4. Sekretaris Pengadilan Negeri Purwakarta
5. Sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
6. Sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
7. Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
8. Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
9. Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
10. Sekretaris Pengadilan Militer Tinggi Surabaya
11. Sekretaris Pengadilan Militer Tinggi Medan
12. Sekretaris Pengadilan Militer Bandung
13. Sekretaris Pengadilan Militer Surabaya
14. Sekretaris Pengadilan Militer Medan

Di Tempat

Sehubungan pelaksanaan Pemeriksaan Terinci atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja, Keuangan Perkara, dan Uang Titipan pihak Ketiga Lainnya Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (sampai dengan Triwulan III), pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya di Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Jawa Barat (Surat Ketua Tim BPK terlampir), bersama ini diberitahukan kepada Saudara untuk menyiapkan sarana dan prasarana, serta dokumen-dokumen yang diperlukan (Dokumen yang diperlukan terlampir) untuk kelancaran pemeriksaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Dokumen tersebut segera dikirimkan melalui surat elektronik/email ke eri.indriyanti@bpk.go.id, rio.soekotjo@bpk.go.id, indri.mauluddin@bpk.go.id, theones.ronald@bpk.go.id.

Demikian pemberitahuan ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, disampaikan terimakasih.

Sekretaris
Mahkamah Agung Republik Indonesia



Tembusan:

1. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
2. YM. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara;
6. YM. Ketua Pengadilan (terkait pemeriksaan).



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Gatot Subroto Nomor 31, Jakarta Pusat 10210 Telepon 021-25549000 Extensi 3562 Faksimile 021-5700501

Jakarta, 10 Oktober 2019

Nomor : 01/Ter/PDPT/10/2019
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Permintaan dokumen

Kepada Yth.
Sekretaris Mahkamah Agung
di
Jakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Terinci atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja, Keuangan Perkara dan Uang Titipan Pihak Ketiga Lainnya Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (sampai dengan Triwulan III) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya di Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur dan Jawa Barat sesuai Surat Tugas Nomor 196/ST/V-XVI.1/10/2019 tanggal 7 Oktober 2019. Dalam rangka pemeriksaan tersebut, kami membutuhkan dokumen-dokumen pada satker berikut:

1. Pengadilan Negeri (PN) Medan, PN Sidoarjo, PN Bale Bandung,,PN Purwakarta,
2. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, PTUN Surabaya, PTUN Bandung,
3. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Medan dan PT TUN Surabaya,
4. Pengadilan Militer (Dilmil) Medan, Dilmil Bandung, Dilmil Surabaya,
5. Pengadilan Militer Tinggi (Dilmilti) Medan dan Dilmilti Surabaya.

Dokumen yang kami butuhkan tercantum pada Lampiran surat ini. Dokumen lainnya yang belum tercantum dalam surat ini akan kami mintakan kemudian dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Demikian pemberitahuan kami. Atas bantuan dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Tim,

Rio Andalas Soekotjo
NIP 198101202006041002

Tembusan Yth.:

1. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN
4. Pengendali Teknis Pemeriksaan

Daftar Permintaan Dokumen

Belanja Pegawai (*Hardcopy* dan *Softcopy*)

1. Bezetting pegawai perbulan Tahun 2018 dan 2019 (sampai dengan Triwulan III) Teknis dan non Teknis; (termasuk didalamnya data SIKEP dan Komdanas backup data)
2. ADK Gaji GPP Tahun 2018 dan 2019 (sampai dengan Triwulan III)
3. Dokumen pembayaran Gaji pegawai Tahun 2018 dan 2019 (sampai dengan Triwulan III)
4. SK Pengangkatan pegawai, SPMT, SKPP Tahun 2018 dan 2019 (sampai dengan Triwulan III) Teknis dan non Teknis
5. Register dan Rekap SK Panglima TNI dan SK KMA, SK Sekma (di Dilmil dan Dilmilti) berikut dokumennya
6. Peraturan-peraturan yang terkait lainnya yang meliputi peraturan Pegawaian seperti (Biaya mutasi, Remunerasi, pola promosi mutasi).

Belanja Modal (*Hardcopy* dan *Softcopy*)

1. Rencana umum pengadaan Tahun 2018 dan 2019 (sampai dengan Triwulan III)
2. Daftar Pengadaan Barang/Jasa (meliputi pelelangan/pengadaan langsung/penunjukkan langsung) pada Tahun 2018 dan 2019 (sampai dengan Triwulan III)
3. Rekapitulasi data kontrak belanja barang/jasa/modal (yang didaftarkan pada KPPN) Tahun 2018 dan 2019 (sampai dengan Triwulan III)
4. Rincian realisasi Belanja Modal Tahun 2018 dan 2019 (sampai dengan Triwulan III). **Untuk masing-masing pengadaan barang/jasa berisi informasi:**
 - a. Dokumen lelang/pengadaan langsung/penunjukkan langsung/seleksi sederhana
 - b. Dokumen pengadaan
 - c. Dokumen Penawaran Pemenang I, II, III
 - d. HPS atau *OE*
 - e. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 - f. Analisa perhitungan harga satuan
 - g. Surat-surat Jaminan Pelaksanaan, jaminan pemeliharaan dan Uang Muka
 - h. Dokumen pembayaran (SPM)
 - i. SP2D Asli dan dokumen pendukungnya.
 - j. Surat Penunjukan Pemenang
 - k. SPMK
 - l. Kontrak, Addendum dan Justifikasi Teknik
 - m. Laporan Bulanan, Mingguan, dan Harian
 - n. *Back Up Data Quality* dan *Quantity*
 - o. Gambar Perencanaan (*shop drawing*)

- p. Gambar Terpasang (*as built drawing*)
 - q. Foto dokumentasi 0% s.d posisi terakhir
 - r. Berita Acara Pemeriksaan Fisik
 - s. Berita Acara Pembayaran
 - t. BA Serah Terima, PHO dan FHO
5. Dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan Pengadaan (Belanja Modal dan Belanja Barang/Jasa termasuk Belanja Jasa Perencanaan dan Pengawasan/Konsultansi) Tahun 2018 dan 2019 (sampai dengan Triwulan III) yang menggambarkan nama rekanan-rekanan melaksanakan kegiatan belanja modal tersebut, jangka waktu pelaksanaan, metode pengadaan, serta nilai pengadaan.
 6. Daftar Pengadaan Belanja Modal dan Barang/Jasa

Belanja Barang (*Hardcopy* dan *Softcopy*)

1. BKU dan Buku Pembantu Tahun 2018 dan 2019 (sampai dengan Triwulan III) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
2. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta BA Pemeriksaan Kas oleh PPK Tahun 2018 dan 2019 (sampai dengan Triwulan III)
3. Rekening Koran Bendahara Pengeluaran Tahun 2018 dan 2019 (sampai dengan Triwulan III)
4. Surat Setoran Pengembalian Belanja Tahun Anggaran 2018 dan 2019 (sampai dengan Triwulan III)
5. Register Pajak Penghasilan 22 (PPH 22) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas kegiatan pengadaan Belanja Modal dan Barang Tahun 2018 dan 2019 (sampai dengan Triwulan III)
6. Bukti Setor/SSP PPh 22 dan PPN atas kegiatan pengadaan Belanja Barang
7. Dokumen bukti pertanggungjawaban Belanja (Laporan kegiatan, kuitansi, bukti perjalanan dinas, dst) Tahun 2018 dan 2019 (sampai dengan Triwulan III).

Biaya Perkara (*Hardcopy* dan *Softcopy*)

1. Laporan Keadaan Perkara bulanan dan Tahunan tahun 2018 dan 2019
2. Laporan Keuangan Perkara (penerimaan dan pengeluaran keuangan perkara) Tahun 2018 dan 2019 (sampai dengan Triwulan III)
3. Rekapitulasi Uang Titipan Pihak Ketiga Lainnya (Biaya Eksekusi, Konsinyasi, dll) Tahun 2018 dan 2019 (sampai dengan Triwulan III).
4. Sisa panjar biaya perkara yang belum dikembalikan ke para pihak/belum disetorkan ke kas negara Tahun 2018 dan 2019 (sampai dengan Triwulan III)
